



Relasi Bisnis dan Politik: Studi Kasus Gejala Krisis Air Bersih di Badung Selatan, Bali

Kadek Naraiswari Anggun Saputri

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedharto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Massive development of tourism accommodation in South Badung have caused water crisis indication which can threaten human security of local society. Water crisis indication is one of critical issue in environmental security. However, there is no joint effort between host government and hotel chain to overcome this problem. This research is aimed to explain why there is no joint effort between host government and hotel chain. This research uses Neo-Marxism and Human Security. Neo-Marxism explains the dependency of developing countries over developed countries investment through MNCs, including in tourism sector by hotel chain. Furthermore, Human Security is used to explain the effect of tourism development over water crisis indication as a serious threat for local society. The result of this research shows that politics and CSR preference are the causative factors. Although most of hotel chain's CSR are charity that evoke skepticism, hotel chain should have been held responsible to help host government in overcoming water crisis indication in South Badung.

Key words: *water crisis indication, human security, neo-Marxism, CSR*

Pendahuluan

Pembangunan akomodasi pariwisata, khususnya hotel berbintang, yang pesat di kawasan Badung Selatan, Bali, menyebabkan destinasi dan pusat pembangunan wisata di Bali tersebut mengalami gejala krisis air bersih. Wilayah yang strategis baik secara geografi, ekonomi maupun sosial-budaya membuat kawasan Badung Selatan menjadi sasaran investasi dan pembangunan akomodasi pariwisata, termasuk hotel berbintang. Hotel berbintang masih menjadi salah satu pilihan para wisatawan yang mana hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata tingkat hunian hotel berbintang mencapai 64,53% (<https://badungkab.bps.go.id/>).

Pembangunan akomodasi hotel berbintang diikuti oleh besarnya konsumsi air bersih sebagai salah satu sarana penunjang pariwisata. Konsumsi air bersih oleh hotel berbintang dalam jumlah besar menimbulkan suatu kompetisi antara hotel berbintang dengan masyarakat lokal. Masyarakat diperkirakan mengonsumsi air sebesar 183 liter/hari, sementara hotel berbintang diperkirakan mengonsumsi air mencapai 1500-4500 liter/kamar/hari (<http://www.mongabay.co.id>). Besarnya konsumsi air tersebut tergantung pada status bintang dan fasilitas yang ada. Semakin tinggi status bintang umumnya memiliki konsumsi air yang semakin tinggi pula.

Dalam memenuhi kebutuhan air bersih, hotel berbintang menggunakan tiga jenis sumber air, yaitu air dari PDAM, air tanah dan air olahan limbah. Hotel berbintang menjadi konsumen air terbesar kedua. Golongan industri besar, termasuk hotel berbintang, tercatat mengonsumsi air dari PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung sebesar

2.201.755 m³ pada tahun 2015 dan konsumsi air tanah mencapai 12.366.200 m³/tahun. Sementara, masyarakat mengonsumsi 8.385.357 m³ air PDAM dan konsumsi air tanah mencapai 7.661.000 m³/tahun. Eksploitasi air tanah di kawasan Badung Selatan menyebabkan adanya kelebihan pemakaian air tanah yang mencapai 3.067.200 m³/tahun. Angka tersebut melebihi batas maksimal pemakaian yang hanya sebesar 25.800.000 m³/tahun. Penggunaan air tanah terbesar berada di kawasan Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Hal ini disebabkan pertumbuhan akomodasi di kawasan Badung Selatan yang membuat pemakaian air tanah lebih banyak daripada wilayah lain (Nusa Bali.com 2015). Secara umum, Kabupaten Badung mengalami kekurangan air bersih 394 liter/detik dan tidak pernah mengalami surplus air bersih. Sementara, di kawasan Badung Selatan tingkat kekurangan air bersih mencapai 163 liter/detik (<http://bali-travelnews.com>). Kondisi tersebut disebabkan oleh pesatnya pembangunan akomodasi pariwisata, kondisi topografis yang tersusun dari batuan yang bersifat porous dan tidak dilindungi lapisan impermeabel serta distribusi ke kawasan tersebut yang belum optimal.

Di kawasan Pecatu, Kuta Selatan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat membeli air tangki dari pihak di luar PDAM seharga Rp 250.000,00-Rp 300.000,00 untuk 1 tangki air berukuran 5.000 liter. Harga air ini akan lebih mahal apabila jarak rumah warga jauh sehingga membutuhkan waktu tempuh lebih lama. Di Kawasan Pecatu terdapat lebih dari 100 KK yang membeli air tangki (<http://denpostnews.com>). Kawasan lain yang juga mengalami hal serupa adalah Kerobokan, yang termasuk kawasan pusat pariwisata di Bali. Kerobokan berada di antara Kuta dan Canggu yang mana kedua daerah tersebut merupakan pusat pembangunan di Badung. Akses air yang sulit sudah dialami sejak lima tahun lalu yang mana pada awalnya sering terjadinya pemadaman air dari PDAM Badung. Semakin masifnya pembangunan akomodasi pariwisata dengan menggunakan sumur bor di kawasan tersebut membuat sumur warga semakin sulit mendapatkan akses air bawah tanah, bahkan sudah tidak muncul air sejak akhir 1990-an (Muhajir, A 2015). Gambaran kondisi tersebut berbeda dengan kondisi yang dialami oleh akomodasi pariwisata di kawasan Badung Selatan yang mana akomodasi pariwisata, termasuk hotel berbintang, tidak pernah mengalami gangguan distribusi air. Hal ini dikarenakan hotel berbintang memiliki sumur bor sebagai cadangan air bawah tanah.

Tidak hanya mengalami krisis secara kuantitas, Badung Selatan juga mengalami krisis dari segi kualitas air. Berdasarkan hasil penelitian di Kuta Selatan menunjukkan bahwa kawasan tersebut mengalami kelebihan BOD₅ dan COD yang melampaui Standar Baku Mutu. Pada musim kemarau, kandungan BOD₅ mencapai 6,36 ppm dari batas Standar Baku Mutu sebesar 2 ppm. Sementara, kandungan COD mencapai 22,92 ppm dari batas standar sebesar 10 ppm. Pada musim hujan, kandungan BOD₅ mencapai 6,45 ppm dan kandungan COD mencapai 23,58 ppm. Dampak kelebihan BOD dan COD yang melampaui Standar Baku Mutu akan berpengaruh pada menurunnya kandungan oksigen terlarut yang akan berpengaruh pada menurunnya kualitas air tanah (Sundra, IK 2015).

Fenomena gejala krisis air bersih ini dapat menjadi ancaman terhadap kemanusiaan, khususnya keamanan lingkungan. Aspek-aspek yang masuk ke dalam ruang lingkup keamanan lingkungan meliputi degradasi lingkungan, berkurangnya sumber daya alam, bencana alam, dan polusi (United Nations Trust Fund for Human Security 2009;6). Keamanan lingkungan yang dimaksud adalah terganggunya akses air bersih sebagai kebutuhan dasar manusia oleh masyarakat dan terjadinya penurunan kualitas air bersih akibat dampak pembangunan akomodasi pariwisata di kawasan Badung Selatan, Bali. PBB mengakui hak asasi manusia terhadap air dan sanitasi serta peran penting air dan sanitasi untuk mencapai realisasi hak asasi manusia melalui Resolusi PBB Nomor 64/292 Tahun 2010. Melalui UN Water, PBB mempromosikan pentingnya upaya bersama untuk mencapai *water security* sebagai keamanan yang bersifat multidimensi dan multisektoral.

Air dinilai sebagai penghubung utama antarberbagai aspek keamanan. Keamanan air menjadi tantangan yang kompleks dan saling berhubungan dari level lokal hingga level internasional untuk mencapai *sense of security*, ketahanan, pembangunan, dan *human well-being* (UN Water 2013). Atas dasar tersebut, diperlukan suatu kolaborasi aktor-aktor yang bersifat interdisipliner dari berbagai sektor, komunitas dan lembaga politik sehingga kemungkinan terjadinya kompetisi dan konflik antarkonsumen air serta dampak jangka panjang dapat dihindarkan (Wouters, dkk, 2009 dalam UN Water 2013).

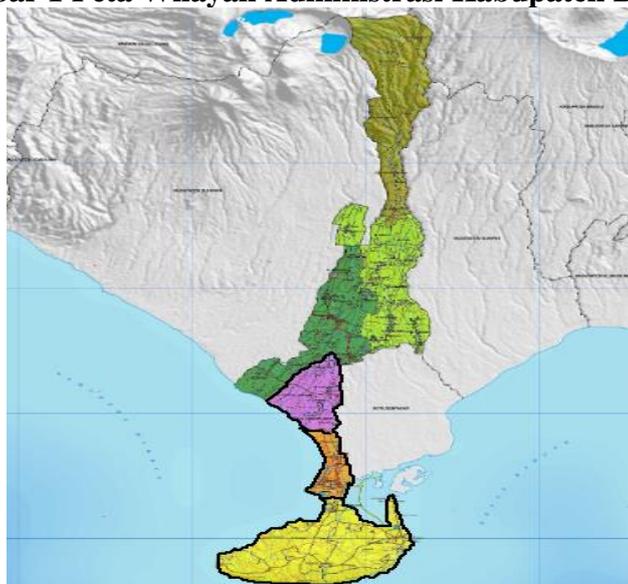
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, seperti pengolahan air limbah domestik melalui *Pilot Test Unit* di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung, merealisasikan Denpasar Sewerage Development Project, optimalisasi IPAL PT. BTDC untuk mengelola dan mengolah limbah domestik yang berasal dari akomodasi pariwisata di bawah naungan PT. BTDC serta melakukan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Petanu. Sementara, hotel berbintang melakukan upaya pengolahan limbah domestik untuk kebutuhan internal. Namun, hingga saat ini belum ada upaya bersama antara kedua pemangku kepentingan tersebut untuk mengatasi masalah gejala krisis air bersih di Badung Selatan, Bali.

Pembahasan

Globalisasi ekonomi dewasa ini menyebabkan semakin pesatnya ekspansi kapitalis yang ditunjukkan melalui perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs) yang bergerak di berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata. Ekspansi ini dilakukan atas dasar adanya konvergensi kepentingan antara negara dan MNCs berupa akumulasi surplus ekonomi (Hadiwinata, 2002: 144). Selain itu, dampak positif aktivitas MNCs, berupa penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan negara dan penyediaan teknologi, juga menjadi salah satu faktor pendorong eksistensi MNCs di negara berkembang. Hotel *chain* dapat dikategorikan sebagai perusahaan multinasional karena adanya sistem penjualan produk atau jasa layanan yang bersifat lintas batas negara (Erbakanova dalam Ivanova, M dkk, 2016:449). *Hotel chain system* merupakan jaringan hotel yang memiliki standar manajemen dan mekanisme-mekanisme tertentu (terutama dalam hal properti) yang mana setiap anak perusahaan wajib mengikuti peraturan atau standar yang telah ditetapkan oleh *hotel management company (HMC)*. *Hotel management company* umumnya berbasis di suatu *headquarter* yang memiliki wewenang untuk memantau sistem dan prosedur yang dilaksanakan oleh anak perusahaan.

Kawasan Badung Selatan meliputi Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara dan Kecamatan Kuta Selatan. Ketiga wilayah tersebut merupakan destinasi utama pariwisata yang mana terdapat objek-objek wisata yang telah dikenal, seperti Nusa Dua, Jimbaran, Kuta, Tanjung Benoa, Seminyak dan Uluwatu. Cakupan wilayah Badung Selatan ditunjukkan oleh area bergaris hitam pada Gambar 1.1. Atas dasar tersebut, Badung Selatan dinilai sebagai kawasan strategis untuk investasi akomodasi pariwisata, terutama hotel berbintang. Hingga tahun 2015, terdapat 155 hotel berbintang dengan 24.683 kamar di Kabupaten Badung yang mana hotel-hotel tersebut berada di kawasan Badung Selatan. Kondisi tersebut membuat Kabupaten Badung menempati urutan pertama sebagai kawasan dengan jumlah hotel bintang terbanyak di Provinsi Bali. Dari 155 hotel berbintang yang ada di Kawasan Badung Selatan, diketahui terdapat 41 hotel berbintang yang menggunakan sistem *chain*. Hotel *chain* tersebut mayoritas didominasi oleh *brand* asal negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris dan Singapura. Gejala krisis air bersih di Badung Selatan turut membawa hotel berbintang yang menggunakan sistem *chain* di kawasan Badung Selatan sebagai pihak yang sudah seharusnya turut bertanggung jawab.

Gambar 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Badung



Sumber: <https://petatematikindo.files.wordpress.com/>, 2013

Namun, hingga saat ini belum ditemukan adanya upaya bersama antara *host government* (pemerintah daerah) dan *hotel chain* yang memberikan dampak dan kontribusi langsung kepada masyarakat dalam menangani gejala krisis air bersih di Badung Selatan, Bali. Hal tersebut selanjutnya dikaji menggunakan dua faktor penyebab, yaitu faktor politik dan faktor preferensi CSR. Pertama, faktor politik yang dimaksud adalah tidak adanya persepsi dan kepentingan bersama antara *host government* dan hotel berbintang yang menggunakan sistem *chain*. Hotel sebagai aktor bisnis dalam melaksanakan aktivitasnya berpedoman pada prinsip dasar korporasi, yaitu mencari keuntungan. Hotel-hotel berbintang yang menggunakan sistem *chain* tersebut cenderung masih memposisikan diri sebagai konsumen air bersih sehingga menilai tanggung jawabnya hanya sebatas pada pemenuhan kewajiban pembayaran pajak dan pemeliharaan lingkungan internal. Kondisi ini diperburuk dengan fakta bahwa belum pernah ada dialog bersama antara pemerintah daerah dengan hotel-hotel tersebut untuk membahas maupun mengkaji permasalahan gejala krisis air bersih di Badung Selatan, Bali. Selain itu, ditinjau dari peraturan di tingkat nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan kewenangan kepada pemerintah secara lebih luas. Hal ini menunjukkan masih adanya dominasi peran pemerintah dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam untuk memperoleh pendapatan daerah secara maksimal. Hal tersebut selanjutnya menimbulkan persepsi bahwa permasalahan yang menyangkut sumber daya alam merupakan ranah dan tanggung jawab pemerintah.

Tidak hanya itu, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga belum diimplementasikan secara optimal dan ditemukan masih adanya beberapa kelemahan dalam implementasi. Pertama, adanya skala prioritas pembangunan daerah yang menitikberatkan perhatian terhadap isu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat membuat tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, termasuk hotel berbintang yang menggunakan sistem *chain*, terbatas pada isu sosial-kemanusiaan. Kedua, Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Forum TJSP) yang sejatinya dapat menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan hotel-hotel berbintang tersebut tidak berfungsi

secara efektif. Ketiga, sistem pelaporan CSR yang belum tersusun secara sistematis sehingga evaluasi terhadap pelaksanaan CSR tidak dapat dilakukan secara optimal.

Sementara itu, ditinjau dari pendekatan Neo-Marxism, fenomena ini dapat digambarkan sebagai bentuk ketergantungan negara berkembang terhadap kapitalisme global melalui MNCs. Ketergantungan yang dimaksud adalah adanya *transfer of surplus* berupa keuntungan atau kontribusi yang diberikan oleh hotel-hotel berbintang yang menggunakan sistem *chain* terhadap pemerintah daerah. Pajak Hotel dan Restoran (PHR) menjadi kontributor terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung yang mana persentasenya sekitar 53,96% dari keseluruhan PAD atau setara dengan 1,15 triliun rupiah per tahun (Dispenda Kabupaten Badung 2016). Hal tersebut menunjukkan adanya bentuk ketergantungan antara *host government* dengan hotel-hotel berbintang yang menggunakan sistem *chain* sehingga secara tidak langsung *host government* dibuat enggan untuk meminta pertanggungjawaban hotel-hotel tersebut terhadap dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas bisnisnya. Kondisi tersebut sejalan dengan penerapan *core* dan *periphery* yang mana hotel *chain* merupakan *core* dan *host government* merupakan *periphery*. *Hotel chain* menyediakan penerapan teknologi dan pengelolaan yang baik dalam industri akomodasi pariwisata yang membuat pengelolaan hotel semakin sistematis. Hal ini menarik minat pengunjung untuk menginap di hotel tersebut melalui penggunaan *brand* hotel yang berskala internasional. *Brand-brand* tersebut pada umumnya sudah dikenal oleh publik sebagai *brand* dengan standar-standar internasional sehingga tidak diragukan lagi fasilitas dan pelayanannya. Hal ini tentu saja berdampak pada meningkatnya keuntungan dan pajak hotel yang selanjutnya dapat diklasifikasikan sebagai *transfer of surplus* berupa kontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun di sisi lain, eksploitasi terhadap *periphery* tidak dapat dihindari. Eksploitasi yang dimaksud berupa eksploitasi sumber daya alam dan penaklukan dari sisi kekuatan politik.

Faktor kedua adalah faktor preferensi CSR. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan salah satu bentuk kontribusi dan kepedulian pelaku bisnis terhadap kawasan investasinya. Mayoritas CSR yang dilaksanakan oleh hotel berbintang yang menggunakan sistem *chain* di kawasan Badung Selatan berupa kegiatan-kegiatan yang bersifat *charity* (ditunjukkan Tabel 1.1). Pemilihan CSR dalam bentuk *charity* ini dilatarbelakangi oleh dua faktor. Pertama adalah regulasi daerah yang menitikberatkan program-program CSR pada skala prioritas pembangunan daerah, yaitu permasalahan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dasar hukum tersebut membuat perusahaan-perusahaan (termasuk hotel berbintang yang menggunakan sistem *chain*) memilih bidang sosial kemanusiaan sebagai fokus perhatian program CSR. Hal ini sejalan dengan pemikiran D'Amato, Henderson dan Florence (2009) bahwa pemilihan program CSR sebuah perusahaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh regulasi pemerintah setempat. Faktor kedua adalah karakteristik pelaksanaan CSR. karakteristik pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh *hotel chain* di Kawasan Badung Selatan dapat dikategorikan ke dalam *corporate charity* yang mana CSR masih berupa program-program yang berlandaskan pada kewajiban guna mengatasi masalah dalam jangka pendek, sasaran utama dari kegiatan sosial kemanusiaan tersebut mayoritas ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, dan kontribusi berupa hibah sosial (donasi sosial). Pemilihan pola CSR *charity* dikarenakan mudah, praktis dan tidak membutuhkan pengelolaan yang lama atau tidak rumit. Selain itu, perusahaan juga akan lebih mudah dalam mencapai *image building* di mata masyarakat sekitar (Fajar, M 2010:55).

Tabel 1
Beberapa Bentuk CSR Hotel yang Menggunakan Sistem *Chain* di Kawasan Badung Selatan

No.	Nama Perusahaan <i>Chain</i>	Cabang di Badung Selatan	Bentuk CSR
1.	InterContinental Hotel Groups (IHG)	- Bali Intercontinental - Holiday Inn Resort Baruna Bali	- donasi untuk bencana alam melalui IHG Shelter Fund - donasi untuk kegiatan anak yatim piatu melalui Yayasan Bali Life - donasi untuk panti asuhan bernama Yayasan Panti Salam - menciptakan IHG Green Engage sebagai sistem pemantauan penggunaan energi hotel secara berkelanjutan - Pelatihan pengembangan skill bagi masyarakat lokal - Menggunakan produk dari daerah Muntigunung (daerah terpencil di Timur Laut Bali) - Menerapkan konsep Tri Hita Karana dalam desain interior bangunan hotel
2.	Starwood Hotels and Resorts Worldwide	- Le Meredian Bali Jimbaran - Sheraton Bali Kuta Resort - The Westin Resort Nusa Dua - The St. Regis Bali Resort - The Laguna Resort and Spa - W Retret and Spa Bali	- Bedah rumah di Kabupaten Klungkung - Membagikan helm secara gratis untuk 600 anak-anak - Menyelenggarakan <i>charity gala dinner</i> untuk mendukung program UNICEF Check Out for Children for its WASH (Water, Sanitation and Hygiene)
3.	Capella Hotel Group	Ayana Resort and Spa Bali	Bedah rumah
4.	Accor	- Ibis Style Kuta Circle - Mercure Hotels	- Beach Cleaning Day di Pantai Kuta - Berpartisipasi dalam <i>Bali Beach Clean Up Program</i>
5.	Hilton Hotel Corp.	Conrad Bali Resort and Spa	Menyelenggarakan pameran dan kelas membuat batik
6.	Wyndham Hotel Group	Ramada Bali Sunset Road Kuta	Donasi untuk Panti Asuhan Sunya Giri
7.	Ritz-Carlton Hotel Company	The Ritz Carlton Bali	Program Community Footprints
8.	Best Western	- Best Western Kuta Beach - Best Western Kuta Villa - Best Western Premier Sunset Road - Best Western Resort Kuta	- Kampanye anti narkoba bersama BNN - Donasi untuk Yayasan Rumah Yatim Bali - Donor darah
9.	Archipelago International (Aston International)	- Grand Aston Bali Beach Resort and Spa - Aston Jimbaran Hotel - Aston Kuta Hotel and Residence	- Donasi bantuan untuk panti asuhan - Donasi untuk orang kurang mampu

10.	Alila Hotels & Resorts	Alila Villas Uluwatu Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Donasi untuk kegiatan keagamaan di desa sekitar hotel - Berpartisipasi dalam pawai festival budaya - Melaksanakan program pelatihan <i>skill</i> untuk anak-anak - Memasang tanki air untuk ketersediaan air di Yayasan Mentari Fajar - Reboisasi hutan bakau di Nusa Dua - Melaksanakan program daur ulang
11.	Meliá Hotels International	Melia Bali Villas & Spa	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pengembangan masyarakat - Pembersihan area pantai, tempat ibadah dan banjar adat - Berpartisipasi dalam acara amal - Donasi untuk karyawan kebun dan keluarga kurang mampu - Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lingkungan

Sumber: data diolah dari berbagai sumber

CSR merupakan implementasi dari prinsip *triple bottom lines*, yaitu *profit* (keuangan), *people* (sosial) dan *planet* (lingkungan). CSR sebagai implementasi prinsip *Good Governance* diharapkan mampu membantu menangani permasalahan yang ada di kawasan investasi. Namun, CSR *charity* yang dilakukan oleh hotel-hotel berbintang yang menggunakan sistem *chain* tidak mampu memberikan kontribusi dan membantu menangani permasalahan gejala krisis air bersih di Badung Selatan. CSR *charity* yang dilakukan justru akan menimbulkan suatu bentuk ketergantungan baru antara masyarakat dengan hotel-hotel berbintang tersebut. Rahman (2009:13-14) mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat kedermawanan tidak dapat dikategorikan sebagai CSR karena kegiatan tersebut tidak memenuhi unsur pelaksanaan CSR, yaitu keberlanjutan dan pemberdayaan komunitas. Kegiatan tersebut meskipun secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh penerima namun hal ini hanya bersifat sementara dan tidak menjadikannya mandiri. Indikasi kesuksesan CSR dapat dilihat manakala adanya kemandirian yang lebih pada komunitas penerima manfaat.

Skeptisme terhadap pelaksanaan program CSR *charity* selanjutnya mulai muncul. Sebagai produk Liberal, pada akhirnya CSR hanya sebagai alat Barat dan bagian dari bentuk imperialisme modern kapitalis. CSR yang notabene digunakan untuk *do good to look good* pada akhirnya hanya digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kepentingan Barat, terutama dalam hal meningkatkan keuntungan investasi dan membangun citra yang positif.

Padahal, dalam memandang relasi antara bisnis dan politik, Neo-Marxism menyatakan bahwa pada dasarnya pemerintah daerah sebagai representasi negara memiliki peran sebagai pengatur dan pengendali hubungan antarborjuis serta memiliki hak dan tanggung jawab untuk menekan pluralitas dan aktivitas borjuis. Selain itu, hotel berbintang yang menggunakan sistem *chain* sebagai korporat yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap masalah di kawasan investasi yang muncul sebagai dampak kehadirannya juga dapat disinergikan sebagai sebuah bentuk kontribusi. Hal tersebut dapat diimplementasikan dalam aktivitas bisnisnya, termasuk dalam menjalankan upaya bersama dengan *host government* dan strategi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua sudut pandang tersebut selanjutnya dapat dikorelasikan sebagai relasi bisnis dan politik yang mana kedua pemangku kepentingan dapat

berpartisipasi aktif sesuai dengan kapasitas namun tetap berkontribusi dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang ditemukan dan analisis menggunakan perspektif Neo-Marxism dan *Human Security* dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab belum adanya upaya bersama antara *host government* dan hotel berbintang yang menggunakan sistem *chain* dalam menangani permasalahan gejala krisis air bersih di Badung Selatan adalah belum adanya persepsi dan kepentingan bersama, adanya ketergantungan melalui *transfer of surplus*, peran pemerintah yang masih mendominasi dalam pengelolaan maupun penguasaan sumber daya alam, peraturan daerah yang belum diimplementasikan secara optimal serta adanya preferensi CSR dalam bentuk *charity* yang lebih bersifat pragmatis.

Referensi

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2016, 'Badung Dalam Angka 2016', diakses pada 25 Februari 2017 <[https://badungkab.bps.go.id/index.php/publikasi/index?Publikasi\[tahunJudul\]=&Publikasi\[kataKunci\]=Badung+dalam+angka&yt0=Tampilkan#](https://badungkab.bps.go.id/index.php/publikasi/index?Publikasi[tahunJudul]=&Publikasi[kataKunci]=Badung+dalam+angka&yt0=Tampilkan#)>.
- Bali Travel News, 2016, 'Badung Masih Kekurangan Air Bersih', diakses pada 4 Maret 2017 <<http://bali-travelnews.com/2016/10/07/badung-masih-kekurangan-air-bersih/>>.
- D'Amato, Henderson dan Florence, 2009, 'Corporate Social Responsibility and Sustainable Business: A Guide to Leadership Tasks and Functions', diakses pada 19 April 2017 <http://www.damits.ac.in/library_doc/CorporateSocialResponsibility.pdf>.
- Denpost, 2015, 'Krisis Air di Pecatu', diakses pada 4 Maret 2017 <<http://denpostnews.com/2015/10/15/krisis-air-di-pecatu/>>.
- Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, 2016, *Profil Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung*.
- Fajar, M 2013, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiwinata, B 2002, *Politik Bisnis Internasional*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ivanova, M dkk 2016, *The Routledge Handbook of Hotel Chain Management*, New York: Routledge Taylor & Francis Group, diakses pada 27 April 2017 <https://books.google.co.id/books?id=9uAeDAAAQBAJ&pg=PA449&lpg=PA449&=Hotel+chain+as+MNC&source=bl&ots=EpWzFrlr75&sig=IvqntWGTJq_qwfcUTSHrUDk&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Hotel%20chain%20as%20MNC&f=false>.
- Nusa Bali, 2015, 'Penggunaan Air Tanah Lebih Ambang Batas', diakses pada 29 Maret 2017 <<http://www.nusabali.com/berita/735/penggunaan-air-tanah-lebih-ambang-batas/halaman/1>>.
- Rahman, R 2009, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sundra, IK 2015, 'Kualitas Air Bawah Tanah di Wilayah Kuta Selatan Kabupaten Badung', diakses pada 6 Maret 2017 <<http://erepo.unud.ac.id/2058/1/b30bbe0480e81c74f3439a983197fc34.pdf>>.

- Suriyani, LD 2015, 'Bali Terancam Krisis Air, Mengapa?', diakses pada 25 Februari 2017 <<http://www.mongabay.co.id/2015/04/15/bali-terancam-krisis-air-mengapa/>>.
- United Nations Trust Fund for Human Security, 2009, Human Security in Theory and Practice: An Overview of Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security, New York, diakses pada 19 Januari 2017 <http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/humansecurity_in_theory_and_practice_english.pdf>.
- United Nations Water, 2013, 'Water Security & the Global Water Agenda: A UN-Water Analytical Brief', diakses pada 16 Februari 2017 <http://www.unwater.org/downloads/watersecurity_analyticalbrief.pdf>.